

ABSTRACT

This study investigates the development of national social housing policy in the Netherlands for the middle-class and the lesson learned for improving Indonesia's social housing policy using a policy learning framework encompassing acquisition, translation, and dissemination. Through qualitative methods using interview and policy document analysis, the research finds that although the Netherlands social housing policy has shifted from a state-led to decentralization, resulting in reduced development and increased regional disparity, its past experiences remain relevant for current Indonesia's housing issues. Key lessons include the acknowledgement of middle-income needs in national social housing policy, 40-40-20 inclusive zoning policy, adapting state-led horizontal projects such as VINEX for quick strategy, considering vertical housing as a future strategy, strengthening monitoring systems, exploring land control mechanisms, and reducing stigma. The findings also suggest that applying the lessons requires strong institutional and legal revision in Indonesia, particularly on top-down legal reform and bottom-up institutional innovation. This study contributes to the theoretical and empirical discourses on social housing developments and calls for future research focusing on the penta helix stakeholders and institutions perspectives. It also demonstrates ethnographic and socio-economic approaches to better understand the perception, behavioral, and the structural surrounding middle-class social housing policy in Indonesia.

Keywords: Indonesia, Middle-Class, Netherlands, Policy Learning, Public Policy, Social Housing

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki perkembangan kebijakan perumahan sosial nasional di Belanda untuk kelas menengah dan pembelajaran yang dipetik untuk meningkatkan kebijakan perumahan sosial Indonesia menggunakan kerangka pembelajaran kebijakan yang mencakup akuisisi, penerapan, dan diseminasi. Melalui metode kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan perumahan sosial Belanda telah bergeser dari yang dipimpin negara menjadi desentralisasi, yang mengakibatkan berkurangnya pembangunan dan meningkatnya disparitas regional, pengalaman masa lalunya tetap relevan dengan permasalahan perumahan Indonesia saat ini. Pembelajaran utama meliputi pengakuan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah dalam kebijakan perumahan sosial nasional, kebijakan zonasi inklusif 40-40-20, adaptasi proyek horizontal yang dipimpin negara seperti VINEX untuk strategi cepat, mempertimbangkan perumahan vertikal sebagai strategi masa depan, memperkuat sistem pemantauan, mengeksplorasi mekanisme pengendalian lahan, dan mengurangi stigma. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran tersebut memerlukan revisi kelembagaan dan hukum yang kuat di Indonesia, khususnya pada reformasi hukum dari atas ke bawah dan inovasi kelembagaan dari bawah ke atas. Studi ini berkontribusi pada wacana teoretis dan empiris tentang perkembangan perumahan sosial dan mendorong penelitian di masa mendatang yang berfokus pada perspektif pemangku kepentingan dan lembaga penta heliks. Studi ini juga menunjukkan pendekatan etnografis dan sosioekonomi untuk lebih memahami persepsi, perilaku, dan struktur yang melatarbelakangi kebijakan perumahan sosial kelas menengah di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Kelas Menengah, Belanda, Pembelajaran Kebijakan, Kebijakan Publik, Perumahan Sosial